

## Sentralisasi vs Desentralisasi Pendidikan Islam

---

**Ahmadi Sholihin**

Kementerian Agama Kota Yogyakarta

E-mail: [qushoyyi@gmail.com](mailto:qushoyyi@gmail.com)

---

### Abstrak

*Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lokal). Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi). Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi.*

**Kata Kunci:** *Desentralisasi, Pendidikan Islam, Sentralisasi*

### Pendahuluan

Kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran-peran pendidikan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi merupakan akses produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu di bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan. Kewajiban untuk menuntut ilmu merupakan perintah dan ajaran Islam. Segala macam ilmu yang bermanfaat bagi dirinya serta semua umat. IPTEK juga merupakan hal penting untuk dipelajari karena dengan cara ini umat Islam dapat memperoleh kemajuan material untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimia, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam merupakan bentuk upaya yang terstruktur untuk membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim. Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian juga merupakan tujuan pendidikan yang harus dimiliki umat Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Sebagaimana penguasaan IPTEK, rekayasa industri, pertanian, penerbangan, pertukangan, dan lainnya juga sangat diperlukan oleh umat manusia.

Lembaga pendidikan semestinya dapat menghasilkan calon-calon penerus yang tinggi secara sumber daya manusianya. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada harus memadukan beberapa unsur pembentuk pendidikan yang unggul. Dalam hal ini, ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan dengan baik, yaitu: 1) Kerjasama yang terpadu antara sekolah, masyarakat, dan keluarga; 2) Kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga Perguruan

Tinggi; dan 3) Orientasi pendidikan ditujukan pada kepribadian Islam dan penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat.

Ketiga hal tersebut merupakan *goal* yang berorientasi pada pembentukan *tsaqâfah* Islam, kepribadian Islam, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Bagi semua kaum muslimin, sistem pendidikan yang sekarang ini tentunya masih memerlukan perbaikan dan semestinya memperbaharui sistem yang ada untuk kebaikan bersama. Lembaga pendidikan perlu berusaha terus untuk menghasilkan generasi berkepribadian Islam yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban bagi umat manusia di seluruh dunia.

### Sentralisasi Pendidikan Islam

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Dalam pemberlakuan kebijakan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah, diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi. Kondisi yang demikian dapat menghadirkan beberapa hal, seperti: kesulitan pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah; daerah tidak dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini dibiarkan, berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa muncul, misalnya, kembali pada kebijakan pendidikan yang sentralistik, tetapi sangat dimungkinkan juga daerah membuat kebijakan pendidikan yang dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya bersebrangan dengan kebijakan pusat. Apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak dilakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan baik, tidak mustahil otonomi tersebut dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam kondisi demikian diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan di daerah dan pusat.

Secara teoritis, sentralisasi mempunyai keunggulan antara lain: 1) organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah; 2) perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut; 3) peningkatan *resource sharing* dan sinergi, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat; 4) pengurangan fasilitas lain, suatu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda; 5) perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya *unity of command*; 6) pemusatan *expertise*, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpin dapat memberi wewenang.

Disamping itu sentralisasi mempunyai kelemahan antara lain: 1) kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut; 2) anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu

tinggi; 3) penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang saja; 4) peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyak masalah pada level unit organisasi yang di bawah; dan 5) perspektif luas, tetapi kurang mendalam pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar kan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

### **Desentralisasi Pendidikan Islam**

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Bahasa desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske (2001) desentralisasi pendidikan adalah suatu proses lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Fakry Gaffar (1990) mengartikan desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun. Desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi: 1) Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas; 2) Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi; 3) mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi; 4) memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal; 5) mengakomodasi kepentingan politik; 6) mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi *Community Based Education* mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain: a) Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan; b) Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini, pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari

pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah (daerah). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan sosial capital, dan pengembangan daya saing bangsa. *Pertama*, masyarakat demokrasi atau masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang antara lain mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka, setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri. Pemerintah dalam masyarakat madani adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Masyarakat demokrasi memerlukan suatu pemerintah yang bersih (*good and clean governance*). *Kedua*, pengembangan "Social Capital", demokrasi sebagai *social capital* hanya bisa diraih dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang menghormati nilai-nilai demokrasi tersebut. Suatu proses belajar yang tidak menghargai akan kebebasan berpikir kritis tidak mungkin menghadirkan nilai-nilai demokrasi sebagai *social capital* suatu bangsa. Sistem pendidikan yang sentralistik yang mematikan kemampuan berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu, desentralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan *social capital* tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat demokrasi berarti pula rakyat ikut membina lahirnya *social capital* dari suatu bangsa. *Ketiga*, pengembangan daya saing. Di dalam suatu masyarakat demokratis setiap anggotanya dituntut untuk berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Di dalam kehidupan bersama tersebut diperlukan kemampuan daya saing yang tinggi untuk bekerja sama. Dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, perkembangan masyarakat menjadi lamban. Masyarakat bergerak dengan komando, sikap masa bodoh dan menunggu merupakan ciri dari masyarakat otoriter. Daya saing di dalam masyarakat bukanlah kemampuan untuk saling membunuh dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain tetapi dalam rangka kerjasama yang dapat meningkat mutu. Eksistensi suatu masyarakat dan bangsa hanya dapat terjamin apabila masyarakat terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya. Ada empat faktor yang menentukan tingkat daya saing seseorang atau suatu masyarakat, yaitu intelegensi, informasi, ide baru, dan inovasi.

Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan yang mengharuskan terselenggaranya desentralisasi pendidikan, bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat.

Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi terinci sebagai berikut: 1) Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan, 2) Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah, 3) Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam, 4) Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat, dan 5) Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu manajemen berbasis lokasi (*site based management*), pendelegasian wewenang, dan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan. Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan.

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal: a) Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa; b) Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah; c) Kemampuan keuangan daerah yang terbatas; d) Sumber daya manusia yang belum memadai; e) Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai; f) Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang; g) Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya: a) Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antar daerah, antar sekolah, antar individu warga masyarakat, b) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan, c) Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah, d) Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotensi akan menurunkan Pendidikan, e) Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu Pendidikan, f) Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam dikarenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial; g) Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut di atas, desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya harus bersikap hati-hati. Ketepatan strategi yang ditempuh sangat menentukan tingkat efektifitas implementasi desentralisasi. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa; 2) Masa transisi benar-benar digunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan dijadwalkan setepat mungkin; 3) Adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan; 4) Adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah; 5) Pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya; 6) Adanya kesadaran dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya; 7) Adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten/kota.

Desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan penerapannya, yaitu: 1) Mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan *social capital* tersebut; 2) Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan; 3) Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat; 4) Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan cara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Adapun kelemahan desentralisasi adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah antar individu warga masyarakat; 2) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan; 3) Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah; 4) Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotensi akan menurunkan pendidikan; 5) Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu Pendidikan; 6) Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial; 7) Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

Pengelolaan pendidikan di era desentralisasi pendidikan sekolah menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Otonomi diartikan kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah mengatur dan mengelola kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri atau aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

MPMBS bertujuan mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Munculnya MPMBS, dikarenakan beberapa alasan antara lain: a) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya; b) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; c) Pengambilan keputusan oleh sekolahnya lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya; d) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat; e) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat; dan f) Sekolah cepat merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan.

### **Realita Pendidikan Sentralisasi vs Desentralisasi Pendidikan Islam**

Analitik pendidikan respons sekolah terhadap perubahan kebijakan di bidang pendidikan menunjukkan kecenderungan yang sama antar sekolah. Bahwa pendidikan yang sentralistik dan desentralistik secara bersamaan masih terdapat dalam proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam penelitian ini, ada beberapa catatan-catatan yang memberikan pemahaman tentang deskripsi kecenderungan-kecenderungan pendidikan sentralistik yang terungkap secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Sentralistik, meliputi: a) Over-regulatif, b) Individualistik (tidak kolaboratif), c) Formalistik-semu, d) Cenderung otoriter, e) Pengambilan keputusan top-down, f) Kontrol dan arahan cenderung individual sangat ketat dan kaku, g) Mengutamakan individu yang cerdas dari pada tim kerja yang cerdas, h) Menekankan pada pendelegasian sangat terbatas, dan i) Mengutamakan pengaturan eksternal-birokratif.
2. Pendidikan Desentralistik, meliputi: a) Satu kesatuan dalam ragam, b) Derugulatif, c) Kolaboratif-tim yang cerdas, d) Koordinatif, e) Demokratis, f) Berbasis kualitas, g) Pengambilan keputusan bottom-up, h) Menekankan dimensi mempengaruhi dan memfasilitasi kegiatan Pendidikan, i) Mengutamakan tim kerja yang cerdas, j) Berani dan piawai mengelola resiko, k) Menekankan pemerintah dan pemberdayaan jajaran Pendidikan, l) Mengutamakan motivasi dan pengembangan potensi diri, m) Mengutamakan informasi terbagi kepada semua pihak, dan n) Berorientasikan keunggulan.

### **Simpulan**

Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini. Disamping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan masa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan Islam atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat

keputusan-keputusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru PAI pada setiap sekolah.

Perubahan paradigma sentralisasi ke desentralisasi membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Partisipasi yang menjadi aset penting bagi pemberdayaan masyarakat hanya bersipat semu. Hal ini memberikan hambatan-hambatan atas sejumlah kebijakan atau program yang di desain tidak bisa berjalan secara optimal. Kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan gagal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Bafadal Ibrahim, 2012, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dwiningrum, Siti Irene A.D. 2012. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H A R. Tilaar, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. *Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pomalingo, Nelson, 2006, *Paradigma Pendidikan dalam Pembangunan Daerah*, (Ed. M. Isnaeni dan Hartono Hadjarati), Jakarta: Pustaka Indonesia Press
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Wibawa, Basuki, 2017, *Manajemen Pendidikan: Teknologi Kejuruan dan Vokasi*, Jakarta: Bumi Aksara Group